



PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	226.448.081.506,00	252.048.754.413,59	111,31%	230.847.977.146,73

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2019, terealisasi sebesar Rp252.048.754.413,59 atau mencapai 111,31% yang berarti Rp25.600.672.907,59 atau 11,31% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp226.448.081.506,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp252.048.754.413,59 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp230.847.977.146,73 terjadi kenaikan sebesar Rp21.200.777.266,86 atau 9,18%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%	83.454.704.361,41
Retribusi Daerah	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	109,90%	19.138.960.648,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	110,00%	13.365.402.573,59
Lain-lain PAD yang sah	111.002.632.000,00	126.028.525.498,59	113,54%	114.888.909.563,23
Total	226.448.081.506,00	252.048.754.413,59	111,31%	230.847.977.146,73

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%	83.454.704.361,41

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp91.077.191.655,45 atau mencapai 110,62% yang berarti Rp8.745.191.655,45 atau 10,62% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp82.332.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp91.077.191.655,45 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 Rp83.454.704.361,41 terjadi kenaikan sebesar Rp7.622.487.294,04 atau 9,13%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Daerah	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pajak hotel	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	101,86%	6.194.574.076,00
2. Pajak restoran	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	120,81%	9.105.087.235,13
3. Pajak hiburan	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	129,44%	1.193.681.396,00
4. Pajak reklame	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	122,49%	2.786.643.986,33
5. Pajak penerangan jalan	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	102,50%	19.722.287.098,64
6. Pajak parkir	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	109,23%	1.619.842.220,00
7. Pajak air tanah	300.000.000,00	330.002.129,20	110,00%	314.745.611,31
8. BPHTB	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	118,17%	21.964.631.908,00
9. PBB	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	106,01%	20.553.210.830,00
Total	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%	83.454.704.361,41

1. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 atau mencapai 101,86% yang berarti Rp121.179.761,00 atau 1,86% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.505.000.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	35.518.184,00	22.314.684,00	62,83%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	6.615.426.097,10	6.603.865.077,00	99,83%
Total	6.650.944.281,10	6.626.179.761,00	99,63%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh tingkat hunian hotel dan kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel sesuai potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak sampai dengan tahun 2019.

Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp6.194.574.076,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp431.605.685,00 atau 6,97%.

2. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12.986.705.054,18 atau mencapai 120,81% yang berarti Rp2.236.705.054,18 atau 20,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.750.000.000,00.

Perincian realisasi pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	83.559.660,00	12.349.110,00	14,78%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	12.887.864.815,18	12.865.881.944,18	99,83%
3. Karcis benda berharga/PP1 2019	108.474.000,00	108.474.000,00	100,00%
Total	13.079.989.475,18	12.986.705.054,18	99,29%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas.

Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2019 sebesar Rp12.986.705.054,18 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp9.105.087.235,13 atau terjadi kenaikan sebesar Rp3.881.617.819,50 atau 42,63%.

3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00 atau mencapai 129,44% yang berarti Rp530.473.974,00 atau 29,44% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.802.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	22.819.500,00	8.254.250,00	36,17%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	2.342.976.724,00	2.324.219.724,00	99,20%
3. Karcis	0,00	0,00	0,00%
Total	2.365.796.224,00	2.332.473.974,00	98,59%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh adanya pembayaran piutang yang mencapai 36,17% dari jumlah piutang pajak hiburan.

Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2018 sebesar Rp1.193.681.396,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.138.792.578,00 atau 95,40%.

4. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.837.373.634,87 atau mencapai 122,49% yang berarti sebesar Rp337.373.634,87 atau 22,49% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Perincian realisasi pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	68.754.705,00	15.842.900,00	23,04%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	1.876.549.039,87	1.821.530.734,87	97,07%
Total	1.945.303.744,87	1.837.373.634,87	94,45%

Pencapaian target kinerja pajak reklame sesuai dengan potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak reklame sampai tahun 2019.

Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.837.373.634,87 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp2.786.643.986,33 atau terjadi penurunan sebesar Rp949.270.351,46 atau 34,07%. Hal ini dikarenakan :

1. Bulan Juni s/d Agustus Moratorium ijin pemasangan reklame
2. Reklame Bando Jalan di bongkar
3. Reklame median jalan juga di bongkar

Pada tahun 2019 terdapat Pajak reklame yang *lebih setordari* jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 329.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Bengkel Bubut Delima dengan NPWP 1.007.0791.01.03. jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 14.000,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 7.000,00
2. Wajib Pajak Ganesha Operation dengan NPWP 1.007.03338.03.08 jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 322.470,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 644.940,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 322.470,00
5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesarRp20.627.903.089,64 atau mencapai 102,50%yang berarti Rp502.903.089,64 atau 2,50%lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.125.000.000,00.

Perincian realisasi pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	1.752.756.172,82	1.752.756.172,00	99,99%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	18.882.724.381,64	18.875.146.917,64	99,96%
Total	20.635.480.554,46	20.627.903.089,64	99,96%

Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.627.903.089,64 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2018 sebesar Rp19.722.287.098,64 atau terjadi kenaikan sebesar Rp905.615.991,00 atau 4,59%.

6. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 atau mencapai 109,23% yang berarti Rp161.580.014,00 atau 9,23% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.750.000.000,00.

Perincian realisasi pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	1.891.076.847,00	1.911.580.014,00	101,08%
Total	1.891.076.847,00	1.911.580.014,00	101,08%

Pencapaian pajak parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2018 sebesar Rp1.619.842.220,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp291.737.794,00 atau 18,01%.

7. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2019 sebesar Rp330.002.129,20 atau mencapai 110,00% yang berarti Rp30.002.129,20 atau 10,00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp300.000.000,00.

Perincian realisasi pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Air tanah	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	29.160,00	0,00	0%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	329.942.409,00	330.002.129,20	100,02%
Total	329.971.569,00	330.002.129,20	100,01%

Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil pajak air tanah. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2019 sebesar Rp330.002.129,20 dibandingkan

dengan realisasi pajak air tanah tahun 2018 sebesar Rp314.745.611,31 atau kenaikan sebesar Rp15.256.517,89 atau 4,85%.

8. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2019 sebesar Rp23.753.115.140,56 atau mencapai 118,17% yang berarti Rp3.653.115.140,56 atau 18,17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.100.000.000,00.

Perincian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	23.753.115.140,56	23.753.115.140,56	100,00%
Total	23.753.115.140,56	23.753.115.140,56	100,00%

Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2019 sebesar Rp23.753.115.140,56 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp21.964.631.908,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.788.483.232,56 atau 8,14%.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.671.858.858,00 atau mencapai 106,01% yang berarti Rp1.171.858.858,00 atau 6,01% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.500.000.000,00.

Perincian realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	6.474.332.880,00	1.301.866.894,00	20,10%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	21.852.696.034,00	19.369.991.964,00	88,64%
Total	28.327.028.914,00	20.671.858.858,00	72,98%

Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan petugas penagih piutang PBB sampai dengan tahun 2019

Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.671.858.858,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2018 sebesar Rp20.553.210.830,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp118.648.028,00 atau 0,58%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	109,90%	19.138.960.648,50

Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp20.301.325.919,00 atau 109,90% yang berarti Rp1.829.587.719,00 atau 9,90% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp18.471.738.200,00. Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.301.325.919,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp19.138.960.648,50 terjadi kenaikan sebesar Rp1.162.365.270,50 atau lebih tinggi sebesar 6,07%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi Daerah SKPD	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	7.787.250.000,00	7.701.829.190,00	98,90%	6.504.931.571,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	9.182.508.200,00	10.663.257.504,00	116,14%	10.717.681.977,50
4.1.2.03. Perizinan tertentu	1.501.980.000,00	1.936.239.225,00	128,91%	1.916.347.100,00
Jumlah	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	109,90 %	19.138.960.648,50

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

1. 4.1.2.01	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
Retribusi Jasa Umum	7.787.250.000,00	7.701.829.190,00	98,90 %	6.504.931.571,00
a. 4.1.2.01.02.	<u>210.000.000,00</u>	<u>227.944.000,00</u>	<u>108,54%</u>	<u>202.595.500,00</u>
Retribusi Pelayanan Persampahan/				
Dinas Lingkungan Hidup	210.000.000,00	227.944.000,00	108,54%	202.595.500,00

➤ **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp227.944.000,00 atau mencapai 108,54 % yang berarti Rp17.944.000,00 atau 8,54% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp210.000.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 227.944.000,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2018 sebesar Rp 202.595.500,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.25.348.500,00 atau 12,51%.

	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
b. 4.1.2.01.05	<u>3.201.000.000,00</u>	<u>2.761.329.000,00</u>	<u>86,26%</u>	<u>1.444.118.500,00</u>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .				
Dinas Perhubungan	3.201.000.000,00	2.761.329.000,00	86,26%	1.444.118.500,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp2.761.329.000,00 atau mencapai 86,26% yang berarti Rp439.671.000,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.201.000.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.761.329.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018 sebesar Rp1.444.118.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.317.210.500,00 atau 91,21 %.

	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
c. 4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar.	<u>3.810.190.000,00</u>	<u>4.170.236.890,00</u>	<u>109,45%</u>	<u>4.088.180.471,00</u>
Dinas Perdagangan	3.810.190.000,00	4.170.236.890,00	109,45%	4.088.180.471,00

	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
d. 4.1.2.02.09 Retribusi Ulang Tera	<u>61.060.000,00</u>	<u>67.322.500,00</u>	<u>110,26%</u>	<u>17.427.500,00</u>
Dinas perdagangan	61.060.000,00	67.322.500,00	110,26%	17.427.500,00

➤ **Dinas Perdagangan**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 4.170.236.890,00 atau mencapai 109,45% yang berarti atau lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 3.810.190.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2019 sebesar 4.170.236.890,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 4.088.180.471,0 atau terjadi peningkatan sebesar Rp82.056.419,00 atau 2,01 %.
- ☑ Realisasi retribusi ulang tera sebesar Rp67.322.500,00 atau mencapai 110,26% yang berarti Rp6.262.500,00 atau 10,26% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp61.060.000,00. dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun 2018 sebesar Rp17.427.500,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp49.895.000,00 atau 286,30%.

Hal ini sesuai dengan potensi riil.

	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
e. 4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	<u>505.000.000,00</u>	<u>474.996.800,00</u>	<u>94,06%</u>	<u>752.609.600,00</u>
Dinas Perhubungan	505.000.000,00	474.996.800,00	94,06%	752.609.600,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp474.996.800,00 atau mencapai 94,06% yang berarti Rp30.003.200,00 atau 94,06% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp505.000.000,00.

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2019 sebesar Rp474.996.800,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar Rp752.609.600,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp277.612.800,00 atau 36,89 %.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

2. 4.1.2.02.	Anggaran2018	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Retribusi Jasa Usaha	9.182.508.200,00	10.663.257.504,00	116,13 %	10.717.681.977,50

a. 4.1.2.02.01	7.445.420.200,00	8.442.093.638,00	113,39%	8.882.639.067,50
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Dinas Perkerjaan Umum	310.000.000,00	543.010.000,00	175,16%	615.525.000,00
Dinas Perhubungan	68.805.600,00	51.124.800,00	74,30%	157.502.700,00
Badan Kepegawaian	200.000.000,00	325.125.000,00	162,56%	333.625.000,00
BPKAD	4.325.058.000,00	4.635.854.533,00	107,19%	4.929.772.055,00
Kec. Kartoharjo	1.200.000.000,00	1.332.168.820,00	111,01%	1.318.393.670,00
Kec. Manguharjo	612.500.000,00	646.240.455,00	105,51%	647.144.335,00
Kec. Taman	700.000.000,00	886.804.230,00	126,69%	869.354.907,50
Dinas Pertanian	29.056.600,00	21.765.800,00	74,91%	11.321.400,00

➤ **Dinas Perkerjaan Umum**

Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga .

- Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sebesar Rp543.010.000,00 atau mencapai 175,16% yang berarti Rp233.010.000,00 atau 75,16% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp310.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp543.010.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp615.525.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp72.515.000,00 atau 11,78%.

➤ **Dinas Perhubungan**

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp51.124.800,00 atau mencapai Rp17.680.800,00 yang berarti 74,30% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp68.805.600,00. Realisasi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 terdiri dari realisasi pemakaian bahu badan jalan dan retribusi gudang/kios ex terminal barang dan sesuai dengan potensi riil.

➤ **Badan Kepegawaian**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp325.125.000,00 atau mencapai 162,56% yang berarti Rp125.125.000,00 atau 62,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp200.000.000,00. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan volume kegiatan yang menggunakan gedung diklat baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di wilayah Kota Madiun. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp325.125.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp333.625.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp8.500.000,00 atau 2,55%.

➤ **BPKAD**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dari BPKAD sebesar Rp4.635.854.533,00 atau mencapai 107,19% yang berarti Rp310.796.533,00 atau 07,19% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.325.058.000,00. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.635.854.533,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp4.929.772.055,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp293.917.522,00 atau 5,96%.

➤ **Kecamatan Kartoharjo**

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan kartoharjo sebesar Rp1.332.168.820,00 atau mencapai 111,01% yang berarti Rp132.168.820,00 atau 11,01% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.200.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi pendapatan ini terdiri atas sewa tanah bengkok sebesar Rp. 1.318.168.820,00 dan realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp. 14.000.000,00 hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari harga dasar di masing – masing kelurahan (peserta lelang). Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.332.168.820,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp1.318.393.670,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp13.775.150,00 atau 1,04%.

➤ **Kecamatan Manguharjo**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan manguharjo sebesar Rp646.240.455,00 atau mencapai 105,51% yang berarti Rp33.740.455,00 atau 5,51% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp612.500.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan manguharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi pendapatan ini terdiri atas sewa tanah bengkok sebesar Rp. 635.490.455,00 dan realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp. 10.750.000,00 hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari harga dasar di masing – masing kelurahan (peserta lelang). Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp646.240.455,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp647.144.335,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp903.880,00 atau 0,14%.

➤ **Kecamatan Taman**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan taman sebesar Rp886.804.230,00 atau mencapai 126,69% yang berarti Rp186.804.230,00 atau 26,69% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp700.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan taman berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi pendapatan ini terdiri atas sewa tanah bengkok sebesar Rp.865.804.230,00 dan realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp. 21.000.000,00 hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari harga dasar di masing – masing kelurahan (peserta lelang). Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp886.804.230,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp869.354.907,50 atau terjadi peningkatan sebesar Rp17.499.322,50 atau 2,01%.

➤ **Dinas Pertanian**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pertanian sebesar Rp21.765.800,00 atau mencapai 74,91% yang berarti Rp7.290.800,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp29.056.600,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp21.765.800,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp11.321.400,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp10.444.400,00 atau 92,25%.

c. 4.1.2.02.04				
Retribusi Tempat Khusus Parkir	<u>823.920.000,00</u>	<u>992.301.956,00</u>	<u>120,44%</u>	<u>717.042.500,00</u>
Dinas Perhubungan	823.920.000,00	992.301.956,00	120,44 %	717.042.500,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp992.301.956,00 atau mencapai 120,44% yang berarti Rp168.381.956,00 atau 20,44% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp823.920.000,00. Realisasi ini sesuai potensi riil. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir parkir Sumber Umis. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

Realisasi tempat parkir khusus tahun anggaran 2019 sebesar Rp Rp992.301.956,00 dibandingkan dengan realisasi tempat parkir khusus tahun 2018 sebesar Rp717.042.500,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp275.259.456,00 atau 38,39 %.

	Anggran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
d. 4.1.2.02.05 Retribusi Rumah Potong Hewan	<u>52.700.000,00</u>	<u>40.418.000,00</u>	<u>76,69%</u>	<u>53.286.000,00</u>
Dinas Pertanian	52.700.000,00	40.418.000,00	76,69%	53.286.000,00

➤ **Dinas Pertanian**

- ☑ Realisasi retribusi rumah potong hewan sebesar Rp40.418.000,00 atau mencapai 76,69% yang berarti Rp12.282.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp.52.700.000,00.

Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2019 sebesar Rp40.418.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2018 sebesar Rp53.286.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp12.868.000,00 atau 24,15%.

	Anggran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
e. 4.1.2.02.06 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>40.000.000,00</u>	<u>87.543.740,00</u>	<u>218,86%</u>	<u>66.100.000,00</u>
Dinas Perkim	40.000.000,00	87.543.740,00	218,86%	66.100.000,00

➤ **Dinas Perkim**

Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp 87.543.740,00 yang merupakan realisasi retribusi rekreasi dan olahraga yang pada tahun 2019 dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian di limpahkan di Dinas Perkim. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2019 sebesar Rp87.543.740,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2018 sebesar Rp66.100.000,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.21.443.740,00 atau 32,44%.

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2019
f. 4.1.2.02.06				
Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>220.468.000,00</u>	<u>200.425.551,00</u>	<u>90,91%</u>	<u>220.468.110,00</u>
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	220.468.000,00	200.425.551,00	90,91%	220.468.110,00

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga**

- Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp200.425.551,00 atau mencapai 90,91% yang berarti Rp20.042.449,00 lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp220.468.000,00.

Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2019 sebesar Rp200.425.551,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2018 sebesar Rp220.468.110,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp20.042.559,00 atau 9,09%.

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2019
f. 4.1.2.02.06				
Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>600.000.000,00</u>	<u>900.474.619,00</u>	<u>150,08%</u>	<u>778.146.300,00</u>
Dinas PU				
	600.000.000,00	900.474.619,00	150,08%	778.146.300,00

- Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp900.474.619,00 atau mencapai 150,08% atau yang berarti Rp300.474.619,00 atau 50,08% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp600.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2019 sebesar Rp900.474.619,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2018 sebesar Rp778.146.300,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp122.328.319,00 atau 15,72%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

3. 4.1.2.03	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Retribusi Perizinan Tertentu	1.501.980.000,00	1.936.239.225,00	128,91 %	1.916.347.100,00
a. 4.1.2.03.01	<u>1.500.000.000,00</u>	<u>1.934.259.225,00</u>	<u>128,95%</u>	<u>1.763.945.500,50</u>
Retribusi Mendirikan Bangunan				
Dinas Pekerjaan Umum	1.500.000.000,00	1.934.259.225,00	128,95%	1.763.945.500,00

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

- Realisasi retribusi IMB sebesar Rp1.943.259.225,00 atau mencapai 128,95% yang berarti Rp434.259.225,00 atau 28,95% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.934.259.225,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2018 sebesar Rp1.763.945.500,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp170.313.725,00 atau 9,66% lebih tinggi.

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
b. 4.1.2.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>150.000.000,00</u>
Dinas Pergadangan	0,00	0,00	0,00%	150.000.000,00

➤ **Dinas Perdagangan**

- Realisasi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun anggaran 2019 tidak terdapat realisasi

d. 4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2.401.600,00</u>
Dinas Perhubungan	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00%	2.401.600,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi izin trayek sebesar Rp1.980.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.980.000,00.

Penurunan realisasi ini disebabkan karena menurunnya jumlah armada angkutan kota dan menurunnya jumlah penumpang sehingga menyebabkan pengusaha angkutan kota maupun koperasi pengelola angkutan kota enggan untuk meremajakan armadanya bahkan menghentikan operasi angkutan kotanya.

Realisasi izin trayek tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.980.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2018 sebesar Rp2.401.600,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp421.000,00 atau 17,55%.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	100%	13.365.402.573,59

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp14.641.711.340,55 atau 100% yang berarti sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.641.711.306,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 PDAM	5.711.547.090,00	5.711.547.090,00	100%	5.670.606.735,00
4.1.3.01.02 BPR Bank Daerah	2.121.736.367,05	2.121.736.367,05	100%	1.374.749.943,89
4.1.3.01.03 Aneka Usaha	693.742.565,45	693.742.600,00	100%	407.804.664,00

4.1.3.02.01 Bank Jatim	6.114.685.283,50	6.114.685.283,50	100%	5.912.241.230,70
Total	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	100%	13.365.402.573,59

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2019 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2018 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2018 sebesar Rp5.670.606.735,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp40.940.355,00 atau 0,72%.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2019 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar per 31 Desember 2018 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2018 sebesar Rp1.374.749.943,89 atau terjadi peningkatan sebesar Rp746.986.423,16 atau 54,34%.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 693.742.600,00 Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2019 target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 693.742.565,45.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2018 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha 2018 per 31 Desember 2018 yang telah diaudit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2018 sebesar Rp5.912.241.230,70 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 202.444.052,80 atau 3,42%.

Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2018 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2018

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	111.002.632.000,00	126.028.525.498,59	113,54%	114.888.909.563,23

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp126.028.525.498,59 atau 113,54% yang berarti Rp15.025.893.498,59 atau 13,54% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp111.002.632.000,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

4.1.1 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.4.01				
Hasil Penjualan aset Daerah Yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00%	1.208.412.534,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.516.423.603,09	101,09%	1.834.248.837,16
c. 4.1.4.03				
Bunga deposito	9.000.000.000,00	18.141.780.820,88	201,58%	14.890.136.985,44
d. 4.1.1.06				
Denda keterlambatan pelaksanaan keg	0,00	847.441.442,46	00,00%	329.598.270,00
e. 4.1.4.10				
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	104.875.185,41	00,00%	45.058.566,00
f. 4.1.4.12				
Pendapatan dari Angsuran /cicilan penjualan	209.500.000,00	108.519.300,00	51,80%	97.489.322,00
g. 4.1.4.13				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	125.232.086,26	125,23	126.325.374,67
h. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.742.072.107,84	00,00%	1.261.841.638,20
i. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	100.193.132.000,00	103.063.149.555,09	102,86%	94.821.064.247,92
j. Pendapatan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
k. Denda Pajak	0,00	369.660.147,56	0,00	274.733.787,84
l. Denda Retribusi	0,00	9.371.250,00	0,00	0,00
Jumlah	111.002.632.000,00	126.028.525.498,59	113,54%	114.888.909.563,23

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
1 Dinas Kesehatan	10.193.132.000,00	10.966.974.494,28	107,59%	10.007.739.510,96
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	10.193.132.000,00	10.966.974.494,28	107,59%	10.007.739.510,96
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
2 RSUD	90.000.000.000,00	92.096.175.060,81	102,33%	84.813.324.736,96
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.15				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	90.000.000.000,00	92.096.175.060,81	102,33%	84.813.324.736,96
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
3 BAPENDA	0,00	369.660.147,56	0,00%	274.733.787,84
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	5.764,32
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Denda Pajak	0,00	369.660.147,56	00,00%	274.728.023,52
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
4 BPKAD (SKPKD)	10.600.000.000,00	22.477.825.245,94	212,05%	19.695.616.441,15

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	1.208.412.534,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.516.423.603,09	101,09%	1.834.243.072,84
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	9.000.000.000,00	18.141.780.820,88	201,58%	14.890.136.985,44
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	100.000.000,00	125.232.086,26	125,23%	126.325.374,67
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.742.072.107,84	00,00%	1.261.841.638,20
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian		104.875.185,41	0,00%	45.058.566,00
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	847.441.442,46	00,00%	329.598.270,00
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	0,00	00,00%	0,00
5 BPKAD	0,00	9.371.250,00	00,00%	0,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian	0,00	0,00	00,00%	0,00
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	0,00	00,00%	0,00
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	9.371.250,00	00,00%	0,00
6 Dinas Pertanian KP	17.500.000,00	25.017.000,00	142,95%	20.456.250,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	17.500.000,00	25.017.000,00	142,95%	20.456.250,00

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
7 Dinas Perdagangan	192.000.000,00	83.502.300,00	43,49%	77.033.072,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	192.000.000,00	83.502.300,00	43,49%	77.033.072,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	111.002.632.000,00	126.028.525.498,59	113,54%	114.888.909.563,23

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

- a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas

- Realisasi pendapatan blud puskesmas sebesar Rp10.966.974.494,28 atau mencapai 107,59% yang berarti Rp773.842.494,28 atau 7,59% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.193.132.000,00.

Realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.966.974.494,28 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2018 sebesar Rp10.007.739.510,96 terdapat peningkatan sebesar Rp959.234.983,32 atau sebesar 9,58%.

2. RSUD

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

- Realisasi pendapatan blud RSUD sebesar Rp 92.096.175.060,81 atau mencapai 102,33% yang berarti Rp2.096.175.060,81 atau 2,33% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 90.000.000.000,00.

Realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 92.096.175.060,81 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2018 sebesar Rp84.813.324.736,96 terdapat peningkatan sebesar Rp7.282.850.323,85 atau sebesar 8,59%.

3. Badan Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan.

- Realisasi pendapatan lain-lain 2019 berupa denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp369.660.147,56 realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB tidak dianggarkan dalam dalam APBD tahun anggaran 2019 karena realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB tidak dapat diprediksi perolehannya.

4. BPKAD (SKPKD)

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

- Realisasi pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun anggaran 2019 tidak ada realisasi .

b. Pendapatan jasa giro.

- Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp1.516.423.603,09 atau mencapai 101,09% yang berarti Rp16.423.603,09 atau 1,09% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.516.423.603,09 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2018 sebesar

Rp1.834.243.072,84 terdapat penurunan sebesar Rp 317.819.469,75 atau sebesar 17,33%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

- Realisasi pendapatan bunga deposito 2019 sebesar Rp18.141.780.820,88 atau 201,58 yang berarti Rp 9.141.780.820,88 atau 101,58% dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp.9.000.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2019 sebesar Rp18.141.780.820,88 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2018 sebesar Rp14.890.136.985,44 terdapat kenaikan sebesar Rp3.251.643.835,44 atau sebesar 21,84%.

d. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

- Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp125.232.086,26 atau mencapai 125,23% yang berarti Rp25.232.086,26 atau 25,23% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2019 sebesar Rp125.232.086,26 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2018 sebesar Rp126.325.374,67 terdapat penurunan sebesar Rp1.093.288,41 atau 0,87%.

e. Pendapatan lain-lain.

Realisasi pendapatan lain lain terdiri dari atas

- Realisasi pendapatan lain-lain sebesar Rp 1.742.072.107,84. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2019. Pendapatan lain lain antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.
- Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp 104.875.185,41. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2019. karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2019.

f. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- Realisasi pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp847.441.442,46. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2019.

5. BPKAD

Pendapatan atas Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi pendapatan atas denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp9.371.250,00. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2019

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp25.017.000,00 atau mencapai 142,95% yang berarti Rp7.517.000,00 atau 42,95% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp17.500.000,00.

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2019 sebesar Rp25.017.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2018 sebesar Rp20.456.250,00 terdapat peningkatan sebesar Rp4.560.750,00 atau sebesar 22,30%.

7. Dinas Perdagangan

a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp 83.502.300,00 atau mencapai 43,49% atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp192.000.000,00.

Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 83.502.300,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2018 sebesar Rp77.033.072,00 terdapat peningkatan sebesar Rp 6.469.228,00 atau 8,40%.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.				
Transfer Pemerintah Pusat Dana	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00	92,96%	678.417.066.007,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan pada tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp681.537.181.650,00 mencapai 92,96% yang berarti Rp51.651.199.350,00 atau lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp733.188.381.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp681.537.181.650,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun anggaran 2018 sebesar Rp678.417.066.007,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.120.115.643,00 atau 0,46%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.01	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	63,36%	25.390.798.853,00
Bagi hasil pajak				
4.2.1.02	86.329.381.000,00	52.685.578.633,00	61,03%	67.464.332.495,00
Bagi hasil SDA				
4.2.2.	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	100%	501.753.246.649,00
DAU				
4.2.3.	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	89,73%	70.689.542.010,00
DAK				
4.2.4.	13.927.277.000,00	13.939.983.813,00	100,09%	13.119.146.000,00
Bagi hasil cukai				
Total	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00	92,96 %	678.417.066.007,00

5.1.2.1.1.Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.1.01	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	63,36%	25.390.798.853,00
Bagi Hasil Pajak				

Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp16.076.390.385,00 atau mencapai 63,36% yang berarti Rp9.295.303.615,00 atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar 25.371.694.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp16.076.390.385,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2018 sebesar Rp25.390.798.853,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.314.408.468,00 atau 36,68%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.01.01 PBB	4.475.453.000,00	3.507.795.600,00	78,38%	4.049.484.520,00
4.2.1.01.02 PPh Pasal 21,25,29	20.896.241.000,00	12.568.594.785,00	60,15%	21.341.314.333,00
Total	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	63,36%	25.390.798.853,00

- Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesarRp3.507.795.600,00 atau 78,38% yang berarti Rp967.657.400,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019.
- Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 sebesarRp12.568.594.785,00 atau60,15% yang berarti Rp8.327.646.215,00 atau 60,15% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019.

5.1.2.1.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02				
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	86.329.381.000,00	52.685.578.633,00	61,03%	67.464.332.495,00

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp52.685.578.633,00 atau 61,03% yang berarti Rp33.643.802.367,00 atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp86.329.381.000,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp67.464.332.495,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.778.753.862,00 atau 21,91%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi sumber daya alam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan realisasi dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02.01				
Sumber daya hutan	234.970.000,00	140.982.000,00	60,00%	250.178.053,00
4.2.1.02.02				
Pungutan hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00%	701.234.591,00
4.2.1.02.04				
Pertambangan minyak & gas bumi	84.265.715.000,00	51.351.710.360,00	60,94%	65.667.268.617,00
4.2.1.02.05				
Pertambangan umum Royalti	811.364.000,00	567.954.800,00	70,00%	814.447.240,00
4.2.1.02.06				
SDA Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07%	31.203.994,00
Total	86.329.381.000,00	52.685.578.633,00	61,03%	67.464.332.495,00

- ☑ Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp 140.982.000,00 atau 60,00% yang berarti Rp93.988.000,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 250.178.053,00 terjadi penurunan sebesar Rp109.196.053,00 atau 43,65%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00 atau 60,00% yang berarti Rp393.437.200,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019. Realisasi ini dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp701.234.591,00 terjadi penurunan sebesar Rp111.078.791,00 atau 15,84%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp51.351.710.360,00 atau 60,94% yang berarti Rp32.914.004.640,00 atau 60,94% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*. Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2018 sebesar Rp65.667.268.617,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.315.558.257,00 atau 21,80%.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Royalti sebesar Rp567.954.800,00 atau 70,00% yang berarti Rp243.409.200,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp811.364.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum Royalti merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp34.775.673,00 atau 103,07% yang berarti Rp1.036.673,00 atau 3,07% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp33.739.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.2 DAU	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	100%	501.753.246.649,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp522.596.024.000,00 yang mencapai 100% atau yang berarti sama dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp522.596.024.000,00. Realisasi DAU tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp522.596.024.000,00 dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2018 sebesar Rp.501.753.246.649,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.20.842.777.351,00 atau 4,15%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrollable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.3. DAK	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	89,73%	70.689.542.010,00

Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp76.239.204.819,00 yang berarti 89,73% yang berarti Rp8.724.800.181,00 atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.964.005.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2018 adalah

sebesar Rp70.689.542.010,00 terjadi peningkatan sebesar Rp5.549.662.809,00 atau 7,85%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

4.2.3 DAK	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Reguler :				
Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jalan	9.896.100.000,00	8.953.419.000,00	90,47%	0,00
Kesehatan	957.238.000,00	4.467.310.349,00	466,69%	0,00
Air minum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sanitasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Lingkungan hidup	0,00	0,00	0,00%	0,00
Keluarga berencana	298.924.000,00	0,00	0,00%	0,00
Transportasi darat	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kelautan & perikanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00%	0,00
Rujukan	1.452.549.000,00	0,00	0,00%	0,00
Farmasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kedaulatan pangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Non Reguler :				
DAK Penurunan Stunting	156.052.000,00	0,00	0,00%	0,00
DAK Pengendalian Penyakit	1.761.830.000,00	0,00	0,00%	0,00
Non Fisik :				
BO P PAUD	4.456.800.000,00	3.948.600.000,00	88,60%	4.080.160.000,00
TPG	59.959.146.000,00	54.369.533.120,00	90,68%	60.594.945.660,00
Tunj.peng.guru	200.350.000,00	142.850.000,00	71,30%	181.500.000,00
TPG Non Profesi	0,00	0,00	0,00%	0,00
BOP Kesehatan	3.332.562.000,00	2.678.626.700,00	80,38%	4.508.014.850,00
JamPerSal	374.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
BOP KB	725.243.000,00	336.437.450,00	46,39%	640.134.500,00
Kependudukan	837.511.000,00	786.728.200,00	93,94%	684.787.000,00

Bantuan OPS	555.700.000,00	555.700.000,00	100%	
Total	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	89,73%	70.689.542.010,00

5.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.4.				
Bagi hasil cukai	13.927.277.000,00	13.939.983.813,00	100,09%	13.119.146.000,00

Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.939.983.813,00 atau mencapai 100,09% yang berarti sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp13.927.277.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai tahun anggaran 2019 sebesar Rp13.939.983.813,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai pada tahun anggaran 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp820.837.813,00 atau 6,26%.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	100%	0,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 55.542.726.000,00 mencapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 55.542.726.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun anggaran 2019 berupa dana otonomi khusus. Demikian halnya pada tahun anggaran 2019 juga tidak menerima dana otonomi khusus.

5.1.2.2 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01	55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	100%	0,00
Dana penyesuaian				

Realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 55.542.726.000,00 mencapai 100,% yang berarti sesuai dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 55.542.726.000,00 .

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	131,96%	78.161.078.616,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi - dana perimbangan pada tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp84.934.976.933,00 mencapai 131,96% yang berarti Rp20.568.362.933,00 atau 31,96% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.366.614.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp84.934.976.933 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2018 sebesar Rp78.161.078.616,00 terjadi peningkatan sebesar Rp6.773.898.317,00 atau 8,67%.

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.3				
Dana bagi hasil pajak provinsi	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	131,96%	78.161.078.616,00

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp84.934.976.933,00 mencapai 131,96% yang berarti Rp20.568.362.933,00 atau 31,96% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.366.614.000,00. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrollable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp84.934.976.933,00 dibandingkan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2018 sebesar Rp78.161.078.616,00. atau terjadi peningkatan sebesar Rp6.773.898.317,00 atau 8,67%.

Perincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. 4.3.3.01.01 PKB	16.600.776.000,00	27.502.812.146,00	165,67%	24.305.453.345,00
2. 4.3.3.01.02 BBNKB	8.188.188.000,00	12.671.773.186,00	154,76%	13.042.285.979,00
3. 4.3.3.01.03 PBBKB	15.745.593.000,00	22.404.927.429,00	142,29%	16.649.136.992,00
4. 4.3.3.01.04 Air Permukaan	163.486.000,00	250.651.372,00	153,32%	203.947.369,00
5. 4.3.3.01.05 Pajak Rokok	23.668.571.000,00	22.104.812.800,00	93,39%	23.960.254.931,00
Total	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	131,96%	78.161.078.616,00

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp27.502.812.146,00 atau mencapai 165,67% yang berarti Rp10.902.036.146,00 atau 65,67% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.600.776.000,00.

Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp27.502.812.146,00 dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2018 sebesar Rp24.305.453.345,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp3.197.358.801,00 atau 13,15%.

2. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp12.671.773.186,00 atau mencapai 154,76% yang berarti Rp4.483.585.186,00 atau 54,76% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp8.188.188.000,00.

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp12.671.773.186,00 dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2018 sebesar Rp13.042.285.979,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp370.512.793,00 atau 2,84%.

3. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp22.404.927.429,00 atau mencapai 142,29% yang berarti Rp6.659.334.429,00 atau 42,29% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp15.745.593.000,00.

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2019 sebesar Rp22.404.927.429,00 dibandingkan dengan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar Rp16.649.136.992,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp5.755.790.437,00 atau 34,57%.

4. Realisasi pajak air permukaan tahun anggaran 2019 sebesar Rp250.651.372,00 atau mencapai 153,32% yang berarti Rp87.165.372,00 atau 53,32% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp163.486.000,00.

Realisasi pajak pemanfaatan air tahun anggaran 2019 sebesar Rp250.651.372,00 dibandingkan dengan realisasi pajak pemanfaatan air tahun 2018 sebesar Rp203.947.369,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp46.704.003,00 atau 22,90%.

5. Realisasi pajak rokok tahun anggaran 2019 sebesar Rp22.104.812.800,00 atau mencapai 93,39% yang berarti Rp1.563.758.200,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp23.668.571.000,00.

Realisasi pajak rokok tahun anggaran 2019 sebesar Rp22.104.812.800,00 dibandingkan dengan realisasi pajak rokok tahun 2018 sebesar Rp23.960.254.931,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.855.442.131,00 atau 7.74%

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	100%	992.050.000,00
---	------------------	------------------	------	----------------

Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.114.579.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.114.579.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.114.579.000,00 dibandingkan dengan realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2018 sebesar Rp992.050.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp122.529.000,00 atau 12,35%.

Perincian anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5

Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	100%	476.850.000,00
---	----------------	----------------	------	----------------

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
Puskesmas Rawat Inap standart	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	100%	163.200.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	72.000.000,00	72.000.000,00	100%	72.000.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00	100%	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	50.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	48.000.000,00	48.000.000,00	100%	48.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00	100%	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100%	0,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,00
Total	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	100%	992.050.000,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3				
Lain-lain pendapatan yang sah	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	99,14%	19.028.068.367,91

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp19.189.280.000,00 atau mencapai 99,14% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp19.356.661.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 dibandingkan dengan lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2018 sebesar Rp19.028.068.367,91 terjadi peningkatan sebesar Rp161.211.632,09 atau 0,85%.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan hibah	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	99,14%	19.028.068.367,91
Total	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	99,14%	19.028.068.367,91

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran2019	Realisasi2019	%	Realisasi2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan Dana Hibah Dana Bos	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	99,14%	19.028.068.367,91

Penerimaan dari pendapatan dana hibah dana bos pada tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp19.189.280.000,00 mencapai 99,14% yang berarti Rp167.381.000,00 atau lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.356.661.000,00. Realisasi pendapatan dana hibah dana bos pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 merupakan pendapatan dana hibah dana bos yang telah di reklas dari pendapatan asli daerah.